



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											√				

Bulan:

1	2	3	4	5	6
					√
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
√																							

Pidsus Kejati Cek Proyek UPT-PU

Asspidsus Janji Ada Indikasi, Diproses

PANGKALPINANG - Tim Tindak Pidana Khusus Kejaksanaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Pidsus Kejati Babel), dalam waktu segera akan mengecek dugaan korupsi pada proyek pembangunan gedung Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pekerjaan Umum (DPU) di Kabupaten Belitung yang menelan dana APBD Provinsi Babel tahun 2014 senilai Rp15,7 miliar.

Asisten Pidsus (Aspidsus) Kejati Babel, Patris Yusrian mengaku, pihaknya terlebih dulu akan mempelajari laporan

"Dari kemaren sudah mulai pengecekan. Dalam arti pengumpulan berita itu kan kita telaah dan akan kita evaluasi atau ada perbuatan melawan hukumnya. Kita lihat, kita pertimbangkan itu untuk ditindaklanjuti," terangnya.

Patris berjanji akan menindaklanjuti laporan masyarakat yang disampaikan melalui pemberitaan pada harian ini dan pihaknya telah siap untuk menelusuri aliran dana proyek tersebut.

"Kalau ada indikasi dugaan tindak pidana korupsi akan kita proses. Sejauh ini kita belum membentuk tim untuk menelusuri aliran dana proyek pembangunan gedung ini. Cuma sudah kita buat telaah untuk diajukan kepada pimpinan," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, pembangunan gedung kantor UPT-DPU di Kabupaten Belitung dilaporkan bermasalah. Proyek pembangunan kantor senilai Rp15,7 miliar itu, diduga dikerjakan asal-asalan oleh kontraktor PT. Barito Permai. Bahkan, sebanyak 16 item pekerjaan dan pengadaan tidak dilakukan kontraktor sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB).

LSM terkait proyek pembangunan gedung itu yang diduga bermasalah.

"Laporan itu akan kita cek dulu apakah ada indikasi atau tidak. Nanti kita minta data tambahan, baru kita simpulkan bisa ditindaklanjuti atau tidak," kata Asspidsus saat ditemui Rakyat Pos di ruang kerjanya, Senin (27/6/2016).

Menurut Patris, pihaknya telah melakukan pengecekan terkait kalangan LSM yang melaporkan kasus itu dan akan mempertimbangkan untuk diproses hukum selanjutnya. ● ke Hal 11 Kol 1

Akibatnya, pelanggaran kontrak kerja terjadi. Termasuk dalam hal keterlambatan pekerjaan yang dilakukan kontraktor dengan alasan yang tidak jelas. Ditambah lagi kekurangan volume pekerjaan yang mencapai nilai ratusan juta rupiah.

Ketidakberesan pembangunan gedung UPT-DPU di Belitung ini, sudah terendus Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Perwakilan Bangka Belitung. Dari perhitungan BPK, kontraktor ditaksir harus mengembalikan uang proyek hingga Rp1 miliar lebih kepada negara.

Rinciannya, pekerjaan pembangunan gedung UPT-PU itu mengalami keterlambatan pekerjaan hingga lebih dari 47 hari terhitung sejak 27 Desember 2014 s.d 16 Februari 2015 pekerjaan diserahkan. Karenanya PT Barito Permai harus membayar denda keterlambatan kepada negara sebesar Rp740,4 juta.

PT Barito juga melanggar kontrak Nomor 640/071.a/PU/SPP/APBD/V/2014 tertanggal 2 Mei 2014 dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 240 hari kalender yaitu sejak tanggal 2 Mei s.d 27 Desember 2014. Namun hingga waktu kontrak berakhir, kontraktor tidak juga



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Media cetak: Bangka Pos Babel Pos
 Babel News Radar Bangka
 Rakyat Pos Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
											√				

Bulan:

1	2	3	4	5	6
					√
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
√																							

selesai melakukan pekerjaan dengan alasan terdapat kendala pencairan anggaran pada internal perusahaan.

Selain itu, dalam pemeriksaan fisik, ditemukan kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp290.569.300,00 pada gedung UPT. Bahkan PT Barito mengerjakan gedung itu tidak sesuai dengan RAB. Dan sebanyak 16 item pekerjaan dalam kontrak tidak dilakukan. Yakni tidak mengerjakan Finish Melamic.

Belum lagi sejumlah item pekerjaan fisik lain yang dikerjakan tidak sesuai kontrak oleh PT Barito. Seperti pembuatan balok beton, plat beton dan pekerjaan lain yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bangka Belitung (Kadis PU Babel), Hasanudin pun mengakui proyek pembangunan kantor UPT itu, bermasalah. Karenanya, Dinas PU sudah memberikan teguran kepada kontraktor pelaksana PT Barito Permai, memutuskan kontrak dan telah dikenakan denda kurang lebih Rp1 miliar.

Hasanudin membenarkan proyek yang dinilai dikerjakan asal-asalan tersebut

merupakan proyek tahun 2014, senilai Rp15,7 M, dan tak bisa diselesaikan oleh kontraktor. Akibatnya sisa pekerjaan dilelang kembali di tahun 2015 dengan nilai Rp5 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan yang belum tuntas.

"Sekarang masih dalam masa pemeliharaan, karena ditenderkan sisanya di tahun 2015, saat ini masih dalam pemeliharaan, dan kita akan tegur kontraktornya jika ada yang tidak beres," tegasnya saat dikonfirmasi Kamis (23/6/2016).

Diakui Hasan, untuk proyek ini memang ada yang belum tuntas dikerjakan kontraktor PT Barito Permai. Seperti pengecatan, tanaman yang mati akan diganti, dan pekerjaan lain masih dalam masa pemeliharaan kontraktor.

"Kemarin sudah dikenakan denda, ini yang tahun 2015 pemenangnya beda lagi, makanya kita terus awasi, jangan sampai ada keterlambatan," bebarnya.

Ditambahkan Hasanudin, ketika proyek ini dikerjakan, dirinya belum menjabat sebagai Kadis PU Babel. Sehingga tidak mengetahui pasti kendala terlambatnya pelaksanaan proyek. **(bis/1)**